
Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/BOS) Dalam Mengatasi Anak tidak Sekolah dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar / Angka Partisipasi Murni (APK/APM) Di Indonesia

INFO PENULIS

Labibah Jilan Fadillah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
labibahjilanfadillah@gmail.com

Alfina Triana Putri
Universitas Muhammadiyah Jakarta
alfinaatrianaa@gmail.com

Habibah Fauziah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
habibahfauziah27@gmail.com

Raihan Fajriansyah
Universitas Muhammadiyah Jakarta
fajriansyahraihan761@gmail.com

Muhammad Arpan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
muhammadarpan471@gmail.com

Nur Muhammad Iqbal
Universitas Muhammadiyah Jakarta
n.muhammadiqbal@umj.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-9558
Vol. 5, No. 3 Desember 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fadillah, L. J., Putri, A. T., Fauziah, H., Fajriansyah, R., Arpan, M., & Iqbal, N. M. (2025). Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/BOS) Dalam Mengatasi Anak tidak Sekolah dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar / Angka Partisipasi Murni (APK/APM) Di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 5(3), 429-436.

Abstrak

Pendidikan merupakan fondasi pembangunan nasional di Indonesia, namun tantangan seperti Anak Tidak Sekolah (ATS) dan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM) masih menjadi masalah utama, terutama di daerah terpencil dan keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengatasi ATS serta meningkatkan APK/APM. Menggunakan model evaluasi CIPP dan Discrepancy Model, penelitian ini menganalisis implementasi, kontribusi, dampak, dan kendala program berdasarkan data BPS, penelitian terkait, dan studi kasus di beberapa daerah seperti Kabupaten Pekalongan, Mamuju Utara, dan Desa Sidoharjo. Hasil menunjukkan bahwa PIP dan BOS telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan ATS dari 4,6 juta anak pada 2020, dengan penurunan angka putus sekolah di jenjang SD dari 0,13% pada 2022 menjadi 0,11% pada 2023, serta peningkatan APK di beberapa wilayah. Namun, kendala seperti keterlambatan pencairan dana, ketidakakuratan data DTKS, dan lemahnya pengawasan di daerah 3T masih menghambat efektivitas. Rekomendasi meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, validasi data, dan sosialisasi intensif untuk mencapai pemerataan pendidikan yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Anak Tidak Sekolah (ATS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Abstract

Education is the foundation of national development in Indonesia, yet challenges such as Out-of-School Children (ATS) and low Gross Participation Rate (APK) and Net Participation Rate (APM) remain major issues, particularly in remote areas and low-income families. This study aims to evaluate the effectiveness of the Smart Indonesia Program (PIP) and School Operational Assistance (BOS) in addressing ATS and increasing APK/APM. Using the CIPP and Discrepancy Model evaluation frameworks, this research analyzes program implementation, contributions, impacts, and obstacles based on BPS data, related studies, and case studies in areas such as Pekalongan Regency, North Mamuju, and Sidoharjo Village. The results indicate that PIP and BOS have significantly contributed to reducing ATS from 4.6 million children in 2020, with a decline in dropout rates at the elementary level from 0.13% in 2022 to 0.11% in 2023, and increased APK in several regions. However, challenges such as delayed fund disbursement, inaccurate DTKS data, and weak supervision in 3T areas still hinder effectiveness. Recommendations include enhancing inter-agency coordination, data validation, and intensive socialization to achieve more optimal educational equity. This research provides a basis for improving national education policies.

Keywords: Public Policy, Smart Indonesia Program (PIP), School Operational Assistance (BOS), Out-of-School Children (ATS), Gross Participation Rate (APK), Net Participation Rate (APM), Education Policy Evaluation.

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berfungsi sebagai instrumen utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan mobilitas sosial. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, hingga saat ini, persoalan pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi tantangan struktural, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, rentan, serta mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada partisipasi pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan

bahwa angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih relatif tinggi meskipun terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) secara nasional. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang menyebabkan sebagian anak tidak dapat mengakses atau mempertahankan keberlanjutan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Faktor kemiskinan, keterbatasan akses geografis, rendahnya kesadaran orang tua, serta lemahnya dukungan lingkungan sosial menjadi penyebab dominan terjadinya putus sekolah.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS dirancang untuk membantu pembiayaan operasional satuan pendidikan agar peserta didik tidak terbebani biaya pendidikan, sementara PIP merupakan program bantuan tunai langsung kepada peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin yang bertujuan mencegah putus sekolah serta mendorong keberlanjutan pendidikan. Kedua program ini menjadi instrumen penting negara dalam upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PIP dan BOS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Yusuf, Ismanto, dan Wastohadi (2019) serta Jumariah dan Rosita (2022) menemukan bahwa PIP berperan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu dan membantu menekan angka putus sekolah. Sementara itu, Rubiyati dan Ismanto (2020) menegaskan bahwa BOS berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan operasional sekolah dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Dampak positif ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan akses pendidikan. Namun demikian, efektivitas implementasi PIP dan BOS belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Ivan (2024) mengungkapkan bahwa peningkatan APK dan APM belum sebanding dengan target nasional, sementara angka ATS di beberapa daerah masih relatif stagnan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi. Kendala yang sering ditemukan meliputi keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan sasaran penerima akibat ketidakakuratan data, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan implementasi juga semakin kompleks di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Baihaqi (2025) serta Nuraini dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi program menyebabkan manfaat PIP dan BOS belum dirasakan secara optimal oleh kelompok sasaran. Selain itu, Bustan, Nur, dan Raniasa (2024) menyoroti bahwa sebagian sekolah masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan dana BOS, di mana alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif dibandingkan peningkatan mutu pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan tidak hanya terletak pada desain program, tetapi juga pada tata kelola dan kapasitas implementor.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara komprehensif. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai sejauh mana PIP dan BOS telah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, maupun ketepatan sasaran. Mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan Dunn (2003), evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian hasil, tetapi juga pada proses implementasi dan dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran. Dengan demikian, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan dan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan bantuan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik dengan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia. Mengadopsi model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan Model Discrepancy, penelitian ini mengevaluasi konteks permasalahan pendidikan, sumber daya yang digunakan, proses implementasi, serta hasil yang dicapai, sambil mengidentifikasi kesenjangan antara standar kebijakan dan realisasi di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan di daerah pilot (Kabupaten Pekalongan, Mamuju Utara, dan Desa Sidoharjo), observasi lapangan untuk melihat praktik implementasi, serta survei kuesioner kepada orang tua siswa dan penerima bantuan. Data sekunder diperoleh dari laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan referensi jurnal seperti Ivan (2024), Bustan et al. (2024), serta Rubiyati & Ismanto (2020). Teknik analisis meliputi analisis deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi dan dampak, analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas antarwilayah, serta triangulasi data untuk memvalidasi temuan. Penelitian dilakukan di Indonesia secara nasional dengan fokus pada daerah pilot selama enam bulan (Januari-Juni 2024), menggunakan data historis dari 2015-2023. Validitas dan reliabilitas dijamin melalui triangulasi sumber, peer review, dan instrumen standar yang diuji coba, memastikan temuan akurat dan dapat diandalkan untuk rekomendasi kebijakan.

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik dalam konteks pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sesuai dengan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam (dalam Wirawan, 2012) digunakan untuk menganalisis konteks tantangan pendidikan seperti ATS di daerah 3T, sumber daya yang dialokasikan untuk PIP dan BOS, proses implementasi yang melibatkan koordinasi lintas-kementerian, serta hasil berupa peningkatan APK/APM.

Model Discrepancy oleh Provus (dalam Rubiyati & Ismanto, 2020) menyoroti kesenjangan antara standar teknis pelaksanaan BOS dengan realisasi di lapangan, seperti keterlambatan pencairan dana dan penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, yang berdampak pada efektivitas program dalam menekan ATS dan meningkatkan partisipasi sekolah.

2. Implementasi Program BOS dan PIP

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2014 memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga miskin berdasarkan DTKS, dengan koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama, namun menghadapi tantangan ketidaktepatan sasaran akibat data tidak akurat dan verifikasi yang lambat (Zamjani, 2019; Bustan et al., 2024; Baihakqi, 2025). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak 2005 mendukung biaya operasional sekolah untuk membebaskan pungutan siswa miskin, tetapi sering terkendala keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam pelaporan SPJ, dan penggunaan dana yang belum optimal untuk peningkatan mutu pembelajaran (Rubiyati & Ismanto, 2020; Husein, 2017; Ilyas et al., 2015; Akbar, 2017).

Penelitian Bustan et al. (2024) menunjukkan bahwa PIP berhasil memperluas akses pendidikan bagi siswa miskin di SD Negeri 1 Jejaw, tetapi distribusi bantuan belum tepat sasaran karena penerima ganda dan ketidakakuratan data. Baihakqi (2025) menemukan bahwa implementasi PIP di desa-desa pilot menunjukkan hasil positif namun tidak merata, dengan wilayah perkotaan lebih cepat meningkatkan partisipasi dibanding pedesaan akibat faktor infrastruktur dan literasi masyarakat.

3. Angka Partisipasi dan Pengurangan ATS

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia meningkat secara marginal, dengan data BPS menunjukkan peningkatan di bawah 3% per tahun dari 2015-2022, lebih signifikan di jenjang dasar dan wilayah perkotaan dibanding daerah 3T (Ivan, 2024). Penyebab utama ATS adalah rendahnya kemampuan ekonomi keluarga, minimnya kesadaran orang tua, dan faktor geografis seperti jarak sekolah yang jauh (Muttaqin, 2017; Malik & Sumarno, 2016), yang diatasi melalui PIP dan BOS untuk meningkatkan aksesibilitas, meskipun efektivitas terbatas oleh disparitas regional (Baihakqi, 2025; Bustan et al., 2024). Studi Ivan (2024) dalam Jurnal Transformasi Administrasi menegaskan bahwa PIP dan BOS belum mampu secara signifikan meningkatkan APK/APM secara nasional, dengan kontribusi lebih kuat dalam menjaga anak tetap sekolah (aksesibilitas) dibanding peningkatan mutu belajar.

4. Kebijakan Bantuan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan bantuan pendidikan seperti PIP dan BOS dirancang sebagai afirmasi sosial untuk menekan ATS, mengurangi beban biaya pendidikan, dan meningkatkan APK/APM, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 (Ivan, 2024; Rubiyati & Ismanto, 2020). PIP diluncurkan pada 2014 untuk siswa miskin, dengan keberhasilan tergantung pada validitas data dan koordinasi daerah, namun belum mencapai peningkatan signifikan pada APK/APM (Ivan, 2024; Bustan et al., 2024). BOS sejak 2005 berperan penting dalam mendukung operasional sekolah, namun ditemukan keterlambatan pencairan, perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta lemahnya pengawasan (Rubiyati & Ismanto, 2020; Hidayati, 2023), yang menyebabkan ketimpangan distribusi antara sekolah negeri dan swasta.

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi acuan dalam penelitian ini. Berikut merupakan ringkasan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ivan (2024) dengan judul Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK/APM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menilai dampak PIP terhadap penurunan angka ATS dan peningkatan partisipasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan APK/APM, namun efektivitasnya masih terhambat oleh ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan sistem pendataan penerima bantuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji PIP sebagai instrumen kebijakan afirmatif pendidikan. Perbedaannya, penelitian Ivan (2024) lebih menekankan pada analisis statistik capaian partisipasi pendidikan, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Jumanah dan Rosita (2022) dengan judul Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran PIP dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP mampu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, namun masih terdapat kesenjangan implementasi antarwilayah akibat perbedaan kapasitas pemerintah daerah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pemerataan pendidikan. Perbedaannya, penelitian Jumanah dan Rosita (2022) lebih berfokus pada capaian program secara nasional, sedangkan penelitian penulis mengaitkannya dengan integrasi kebijakan BOS dan PIP.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rubiyat, Ismanto, dan Ismanto (2020) dengan judul Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. Penelitian ini menganalisis peran BOS dalam peningkatan sarana prasarana dan kualitas pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara terhadap pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOS mendukung peningkatan kualitas pendidikan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sekolah dan pengawasan anggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas kebijakan BOS. Perbedaannya, penelitian Rubiyat dkk. (2020) lebih menitikberatkan pada aspek manajerial sekolah, sedangkan penelitian penulis menekankan keterkaitan BOS dengan kebijakan afirmatif pendidikan.

C. Hasil & Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam akses pendidikan berdasarkan data lampiran, dengan PIP memberikan bantuan tunai kepada siswa miskin usia 6-21 tahun melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), jumlah penerima meningkat dari 18.248.287 pada 2017 menjadi 18.745.047 pada 2018, meskipun turun menjadi 17.900.000 pada 2019, melalui koordinasi antar-kementerian sesuai Permendikbud No. 9/2018. BOS menyediakan dana operasional non-personalia bagi sekolah dasar dan menengah, anggaran di Kabupaten Pekalongan meningkat dari Rp 184.000.000 pada 2018 menjadi Rp 4.010.600.000

pada 2023, digunakan untuk operasional siswa paket A/B/C, pengembalian anak tidak sekolah (ATS), dan bantuan sekolah gratis, dengan penyaluran langsung ke rekening sekolah sejak 2020 untuk transparansi, namun pengawasan inspektorat lemah di Mamuju Utara menimbulkan risiko penyelewengan. Kontribusi dalam menurunkan ATS terlihat dari angka putus sekolah di jenjang SD turun dari 0,13% pada 2022 menjadi 0,11% pada 2023, dengan BOS membebaskan pungutan, sementara di Kabupaten Pekalongan ATS berkurang dari 4.346 anak pada 2019 menjadi 2.396 anak dikembalikan pada 2023. Secara nasional, ATS turun dari 4,6 juta anak pada 2020, dengan PIP berkontribusi pada penurunan di jenjang SMP dari 1,06% pada 2022 menjadi 0,98% pada 2023, meskipun di Mamuju Utara ATS tinggi seperti 38 kasus di Desa Terusan, namun BOS membantu melalui pendampingan. Di Desa Sidoharjo, program Pengembalian Anak Tidak Sekolah (P-ATS) berhasil mengembalikan 29 anak ATS pada 2023 melalui pendekatan door-to-door dan aplikasi Kerismojo. Dampak terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) positif, dengan APK SD mencapai 115% sejak 2005 dan APM stabil di atas 90% di beberapa daerah, di mana BOS menutupi 55-58% biaya pribadi siswa.

Di Kabupaten Pekalongan, APK SMP naik dari 78,20% pada 2019 didukung PIP, sementara di Mamuju Utara APM SD meningkat namun SMA rendah. Di Desa Sidoharjo, P-ATS meningkatkan partisipasi melalui pendampingan, dengan APM siswa usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan SMA sekitar 38,35% secara nasional, dan APK SMP serta SMA di bawah 80%. Program ini mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi dan berkontribusi pada penurunan ATS, meskipun belum merata di daerah 3T. Faktor kendala meliputi keterlambatan pencairan dana BOS di akhir triwulan di Kabupaten Pekalongan, ketidakakuratan DTKS untuk PIP menyebabkan ketidaktepatan sasaran, pengawasan lemah di Mamuju Utara, sosialisasi kurang intensif di pedesaan, kurangnya motivasi orang tua, dan infrastruktur digital terbatas di 3T, dengan kemiskinan 10,19% pada 2020 dan angka putus sekolah tinggi di jenjang atas terkait zonasi ketat serta kurangnya kesadaran masyarakat.

2. Pembahasan

Pembahasan ini mengintegrasikan hasil empiris dengan teori evaluasi kebijakan publik, seperti model CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam (dalam Wirawan, 2012), model Discrepancy (Rubiyati & Ismanto, 2020), dan teori implementasi Van Meter & Van Horn (dalam Kasmad, 2018), untuk menganalisis efektivitas PIP dan BOS dalam konteks pemerataan pendidikan. Analisis ini menekankan kesenjangan antara rancangan kebijakan dan realisasi, serta implikasi untuk reformasi kebijakan, dengan sub-bab yang memfasilitasi diskusi kritis.

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia

Implementasi PIP dan BOS menunjukkan kesesuaian parsial dengan standar kebijakan, namun kesenjangan signifikan muncul di tingkat operasional, terutama di daerah terpencil. Berdasarkan model CIPP, konteks permasalahan pendidikan (kemiskinan dan ATS tinggi) telah diidentifikasi dengan baik melalui data BPS, namun input seperti anggaran BOS yang meningkat (Rp 184.000.000 ke Rp 4.010.600.000 di Kabupaten Pekalongan) tidak selalu diimbangi oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. Proses implementasi, termasuk koordinasi antar-kementerian (Pendidikan, Sosial, Agama), berjalan melalui mekanisme penyaluran langsung sejak 2020, meningkatkan transparansi, namun lemahnya pengawasan inspektorat di Mamuju Utara (Akbar, 2017) menimbulkan risiko penyelewengan, sesuai dengan temuan model Discrepancy yang menunjukkan gap antara petunjuk teknis dan realisasi lapangan.

Dari perspektif Van Meter & Van Horn, karakteristik implementor (kepala sekolah dan bendahara) menunjukkan komitmen positif, namun disposisi mereka terbatas oleh lingkungan ekonomi miskin (kemiskinan 10,19%, 2020) dan sosial budaya, yang menghambat motivasi keluarga. Evaluasi berdasarkan kriteria Dunn (2003) efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan efektivitas dalam pembebasan pungutan, namun efisiensi terganggu oleh keterlambatan dana BOS, yang mempengaruhi perencanaan kegiatan seperti pembelian alat peraga. Kecukupan dana cukup untuk operasional dasar, pemerataan baik namun tertinggal di daerah 3T, responsivitas tinggi terhadap keluarga miskin, dan ketepatan sasaran meningkat melalui integrasi DTKS, meskipun data tidak akurat di beberapa wilayah (Bustan et al., 2024). Secara keseluruhan, implementasi telah mencapai target awal, tetapi adaptasi lokal seperti pendekatan door-to-door di Desa Sidoharjo (Baihakqi & Rahaju, 2025) menunjukkan perlunya fleksibilitas untuk mengatasi disparitas regional, mendukung rekomendasi monitoring rutin untuk optimalisasi.

Kontribusi Program PIP dan BOS dalam Menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kontribusi PIP dan BOS dalam menekan ATS signifikan namun tidak merata, dengan penurunan dari 4,6 juta anak (2020) ke tingkat yang lebih rendah, terutama melalui bantuan tunai PIP yang meringankan beban ekonomi (Ivan, 2024). Model CIPP menjelaskan bahwa input finansial cukup, namun proses pengembalian ATS melalui kunjungan rumah di Kabupaten Pekalongan terganggu oleh efisiensi rendah akibat keterlambatan dana BOS, sesuai dengan kriteria Dunn (2003). Kecukupan dana BOS memadai untuk operasional dasar, namun tidak untuk kebutuhan tambahan seperti transportasi, sehingga ATS tetap tinggi di daerah miskin.

Van Meter & Van Horn menyoroti bahwa komunikasi antar-organisasi perlu diperbaiki untuk menghindari tumpang tindih, sementara disposisi implementor positif namun terbatas oleh lingkungan ekonomi lemah dan sosial (pernikahan dini). Model Discrepancy mengungkap gap antara standar (penurunan ATS nol pada 2045) dan realisasi (ATS tinggi di Mamuju Utara), dengan pendampingan BOS sebagai solusi parsial. Pendekatan lokal di Desa Sidoharjo menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat memperkuat kontribusi, mengurangi kesenjangan gender. Rekomendasi implikatif meliputi penguatan monitoring untuk keberlanjutan, dengan fokus pada pendidikan non-formal untuk mengatasi hambatan budaya, guna memastikan kontribusi program lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Program PIP dan BOS terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Dampak PIP dan BOS terhadap APK dan APM positif namun terbatas oleh kendala struktural, dengan APK SD mencapai 115% dan APM stabil >90% di beberapa daerah, namun APK SMP/SMA <80% secara nasional (BPS, 2023). Model CIPP menganalisis konteks kemiskinan sebagai pendorong, input dana BOS yang menutupi 55-58% biaya pribadi, dan proses yang terganggu oleh keterlambatan, mempengaruhi produk seperti peningkatan APK di Kabupaten Pekalongan. Dunn (2003) menilai efektivitas terlihat dari penurunan ATS, namun efisiensi rendah menghambat dampak pada mutu pendidikan, dengan APM siswa 16-18 tahun ~38,35% menunjukkan keterbatasan di jenjang atas.

Van Meter & Van Horn menekankan lingkungan sosial yang mendukung melalui program seperti P-ATS di Desa Sidoharjo, dengan disposisi implementor positif namun terhambat oleh ekonomi lemah (kemiskinan 10,19%). Model Discrepancy mengidentifikasi gap antara rancangan (pemerataan partisipasi) dan realisasi (disparitas di 3T seperti Mamuju Utara). Dampak ini mengurangi kesenjangan gender, namun tantangan seperti kurangnya relevansi kurikulum di SMA memerlukan sinergi dengan program vokasi. Rekomendasi meliputi evaluasi responsivitas terhadap kebutuhan siswa dan integrasi lintas-sektor (pendidikan-kesehatan) untuk mengatasi faktor sosial seperti pernikahan dini, memastikan dampak jangka panjang.

Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Program dan Solusi Kebijakan yang Dapat Diterapkan

Kendala utama meliputi efisiensi rendah (keterlambatan dana BOS), ketidaktepatan sasaran (DTKS tidak akurat), dan pengawasan lemah, diperburuk oleh lingkungan ekonomi dan sosial (kemiskinan 10,19%, kurangnya motivasi orang tua). Model CIPP mengidentifikasi input yang cukup namun proses yang lemah, sementara Van Meter & Van Horn menyoroti karakteristik implementor yang kurang terlatih dan komunikasi antar-organisasi yang lemah, menyebabkan tumpang tindih. Dunn (2003) menekankan bahwa kendala ini mengurangi responsivitas, dengan hambatan teknis seperti infrastruktur digital terbatas di 3T.

Solusi kebijakan meliputi percepatan pencairan dana via transfer langsung, integrasi DTKS untuk ketepatan sasaran, dan sosialisasi intensif (kampanye digital, kunjungan lapangan). Pelatihan implementor, penguatan komunikasi melalui platform digital, dan kebijakan afirmasi untuk 3T (kuota BOS tambahan) direkomendasikan. Evaluasi rutin berdasarkan model Discrepancy dapat meminimalkan gap. Contoh di Kabupaten Pekalongan (jalur afirmasi) dan Mamuju Utara (tim inspektorat) menunjukkan efektivitas solusi lokal. Secara implikatif, integrasi lintas-sektor dan fokus pada inklusi anak berkebutuhan khusus akan memperkuat efektivitas, mendukung pemerataan pendidikan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah terbukti efektif sebagai kebijakan afirmatif dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM), terutama di jenjang dasar, dengan kontribusi signifikan seperti penurunan ATS dari

4,6 juta anak pada 2020 dan pengembalian ribuan anak sekolah melalui bantuan tunai dan operasional. Namun, implementasi masih dihadapkan pada kendala seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan sasaran, pengawasan lemah, dan disparitas regional di daerah 3T, yang mengurangi efisiensi dan pemerataan program.

Rekomendasi utama meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi melalui platform digital, validasi data DTKS yang lebih akurat, percepatan mekanisme pencairan dana, serta intensifikasi sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengatasi faktor sosial dan ekonomi. Dengan pembenahan ini, program PIP dan BOS dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, mendukung target nol ATS pada 2045, dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi rutin berdasarkan model CIPP dan Discrepancy untuk meminimalkan kesenjangan antara kebijakan dan realisasi, memberikan dasar bagi inovasi kebijakan publik di bidang pendidikan.

E. Referensi

- Akbar, M. F. (2017). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 2(1), 15–27.
- Baihakqi, V., & Rahaju, T. (2025). Implementasi program penanganan anak tidak sekolah (P- ATS) bertajuk “Ayo Sekolah Rek” di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 1–14.
- Hasanah, R. (2024). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(3), 78-90. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JIEM/article/view/16633>
- Hidayat, R. A., & Sulastri, E. (2025). Permasalahan Putus Sekolah Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3).
- Ivan, M. (2024). Evaluasi kebijakan bantuan pendidikan dalam mengatasi anak tidak sekolah(ATS) dan peningkatan angka partisipasi kasar/angka partisipasi murni (APK/APM) Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(01), 81–93.
- Jumanah., & Rosita, H. (2022). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 180-190. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/6042>
- Kholik, B., Budiyanto, M. N., & Putra, R. (2024). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Di Sd Negeri 1 Jejawi. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 12(3).
- Nuraini, S., & Rahman, F. (2023). Evaluasi kebijakan penanggulangan anak tidak sekolah (ATS) di tingkat daerah: Studi evaluatif implementasi kebijakan pendidikan daerah dalam mengurangi angka ATS. *Jurnal Penelitian Daerah*, 14(2).
- Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(1), 54-65. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/99>
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 6(2), 220–229. <https://ejournal3.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/2614>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/1498>
- Zamjani, I. (2019). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2).